

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Hartono, Sunarjati. (1968). Apakah the rule of law itu?. Bandung: Alumni.
- Huda, N. (2014). Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press.
- I Nyoman S. (2005). Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta: Citra Utama.
- Rahmadi, T. (2012). Hukum Lingkungan Diindonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, dan Praktik), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

JURNAL:

- Daud, TON., Puluhulawa, FU., & Tome, AH. (2023). Faktor Penghambat Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Masa Otonomi Daerah. *Journal of Comprehensive Science*, 2(5), 1356-1374.
- Harahap, DA. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hasil Hutan Demi Kesejahteraan Masyarakat Setelah Keluarnya UU No. 23 tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia*, 1(1), 12-27.

- Jabaruddin., Guntur, S., & Karmila. (2023). Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa. *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 6-12.
- Kambey, SY. (2015). Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan (antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). *e-Jurnal Katalogis*, 3(1), 10-20.
- Komarodin, I., & Flambonita, S. (2020). Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kehutanan di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata*, 615-629.
- Nuha, S.R. (2021). Kewenangan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang (Studi Penelitian pada Desa yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup). Universitas Diponegoro Semarang.
- Nur, A.H., & Putra, L.M. (2023). Analisis Hukum Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Hasil Hutan di Desa Wasuamba Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di UPTD KPH Unit II Lasalimu Kabupaten Buton) *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 1(2), 1-18.
- Pambudhi, HD., & Muhammad, AV. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kehutanan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Law Review*, 21(3), 363-385.
- Perdana, RP. (2019). Penegakan Sanksi Administrasi Untuk Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Lingkungan Di Kabupaten Semarang [skripsi]. Semarang: Universitas Semarang.

- Renjaan, H., & Erare, SR. (2013). Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah. *Patriot*, 6(1), 54-100.
- Septi Nur Wijayanti. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Media Hukum*, 23(2), 194-198.
- Sri Nur Hari. (2020). Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 430-438.
- Suparto. (2017). Otonomi Daerah di Indonesia; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. (Pekanbaru: Universitas Islam Riau). 5-13.
- Suparto. (2017). Memahami Penguasaan Hutan dan Kawasan Hutan oleh Negara. (Pekanbaru: Universitas Islam Riau). 11-15.

KAMUS:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-5. 2016. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.